

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.P. Parlindungan. (1999). *Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP.No. 24/1997 dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah PP. 37 Tahun 1998)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- A. P. Parlindungan, S. (2009). *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Chomzah, A. A. (2004). *Hukum Agraria Pertanahan Indonesia (Vol. Jilid 1)*. Jakarta.
- Fajar, M. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Joenaidi, J. I. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Muchsin, I. K. (2010). *Hukum Agraria Indonesia Dalam Prespektif Sejarah*. Bandung: Refika Aditama.
- R. Suprpto. (2006). *Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Praktek*. Jakarta: CV. Mustari.
- Rusyaidi, A. (2009). *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Santoso, U. (2005). *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah (Cetakan Kedua)*. Jakarta: Prenada Media.
- Santoso, U. (2012). *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.

Sutedi, A. (2018). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutedi, A. (2011). *Sertifikat Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sembiring, J. J. (2010). *Paduan Mengurus Sertifikat Tanah*. Jakarta: Visi Media.

Sugiharto, U. S. (2015). *Hukum Pengadaan Tanah*. Malang: Setara Press.

Teddy Prima Anggriawan, A. M. (2023). *Pengantar Hukum Perdata*. Surabaya: Scopindo.

Wignyosoebroto, S. (1991). *Pengertian Kepentingan Umum Dalam Pembebasan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Gema Clipping Service Hukum.

Yagus Suyadi, S. M. (2023). *Menuntaskan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Jurnal :

Alvina N.A., Dkk, (2023). Tumpang Tindih atas Tanah. *Jurnal Legal Spirit*, Vol 7(2): 205-218. Doi: <https://doi.org/10.31328/lis.v7i2.4807>

Amiri, K. (2016). Pengelolaan Barang Milik Negara Secara Akuntabel Menuju Good Governace. *Potret Pemikiran Institit Agama Islam Negeri Manado*. Vol. 20 (2) : 31-44. Doi: <http://dx.doi.org/10.30984/pp.v20i2.753>

Candya Upavata Karta Negara, d. (2021). Urgensi Sistem Pengamanan Pada Sertifikat Tanah Digital. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 2 (9): 832-855 hlm. Doi : <http://dx.doi.org/10.56370/jhlg.v2i9.91>

Faris Faza Ghainiyyu, d. (2022). Jaminan Kepastian Hukum Konversi Sertifikat Menjadi Elektronik Serta Perlindungannya Sebagai Alat Pembuktian. *Jurnal*

USM Law Review. Vol.5,(1) : 172-187 . Doi:

<http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4553>

Gandi A. (2024). Tinjauan Yuridis Sertifikat Tanah Elektronik Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Di Indonesia. *Universitas Negeri Surabaya*. Vol.10 (3) : 57-72. Doi : <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0>

KMS Herman, Dkk, (2023). Sertifikat-El Sebagai Tanda Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Innovative : Journal Of Social Science Research*. Vol.3 (2) : 1-11. Doi : <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2>

Nadya R.N (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Elektronik. *EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum*. Vol. 2 (2) : 26-32. Doi: <https://doi.org/10.35327/gara.v17i3.549>

Mutiarany, D. P. (2022). Program Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Dan Lengkap (PTSL) di Jakarta. *Bengawan Abioso*. Vol. 13 (1) : 13-23. Doi: <https://doi.org/10.37893/abioso.v13i1.29>

Syarfaatul Hidayah, d. (2024). Tantangan dan Peluang Sertifikat Elektronik dalam Reformasi Pendaftaran Tanah di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Nusantara*. Vol.1 (6) : 186-199. Doi: <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i6.2793>

Winanti, Reza A. dan Atik W, (2023) Urgensi Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023. *Jurnal LSM Law Review*. Vol.7 (1) : 835-852. Doi: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i2.9178>

Zahra ATS Tsaurah, F. F. (2023). Penyelesaian Sertifikasi Barang Milik Negara pada Bidang Tanah. *Tunas Agraria*. Vol. 6 (2) : 220- 236. Doi: <https://doi.org/10.31292/jta.v6i3.243>

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6856)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang milik Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara RI Nomor 59 Tahun 1997)

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Di Lingkungan Departemen Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 551)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 12)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pendaftaran Tanah Elektronik (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 46)

Lain-Lain:

Data penyerahan sertifikat tanah elektronik 2023 oleh Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Substansi Pendaftaran Dan Pengelolaan Tanah Pemerintah Kantor Pertanahan Jakarta Utara, Jakarta 13 Agustus 2024

Majalah Ruang Bumi, Edisi Januari-Maret 2021, Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria Dan Tata ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Agraria Dan Tata ruang/Badan Pertanahan Nasional

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2021, Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Wawancara Bapak Heru Saputra selaku Staff Penetapan Hak Tanah Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, membahas tentang tahapan pelaksanaan sertifikasi tanah elektronik melalui program PTSL. Jakarta, 16 Agustus 2024

Wawancara Bapak Indra Haditama, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, membahas tentang upaya adanya tantangan dalam penerbitan sertifikat-el beserta pencapaiannya. Jakarta 15 Agustus 2024

Wawancara Bapak Joko Hartanto selaku Staff Pendaftaran Hak Tanah Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, membahas tentang tantangan dalam penerbitan sertifikat-el. Jakarta, pada 14 Agustus 2024

Wawancara dengan Bapak Soehartono, S.H. selaku Koordinator Substansi Pendaftaran Dan Pengelolaan Tanah Pemerintah Kantor Pertanahan Jakarta

Utara, membahas tentang prosedur dan sistematika sertifikasi bidang BMN.

Jakarta 13 Agustus 2024

Wawancara dengan Ibu Santi Arianti, S.H., M.Kn selaku PPAT dan Notaris, membahas tentang kelemahan dan kelebihan dari sertifikat-el bagi pemilik

hak atas tanah Surabaya, 11 November 2024

Wawancara Bapak Taufik Suroso Wibowo S.SIT., MH. Selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, membahas tentang keunggulan sertifikat elektronik dan sejarah dari penerapan sertifikat-el di Indonesia.

Jakarta, 14 Februari 2024